



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 133 Tahun 1997

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca :
1. Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 10 Tahun 1997 tentang Penetapan Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
 2. Surat Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 616/1320/16/1997 tanggal 29 Juli 1997 perihal Pengesahan Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
 3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor : 172.539.50.1997 tanggal 26 Agustus 1997 perihal persetujuan kenaikan tarif PDAM Way Rilau.
- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan harus dikelola berdasarkan prinsip ekonomi Perusahaan yang sehat;
 - b. bahwa untuk mendukung dan kelancaran operasional perusahaan daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif air bersih dengan perkembangan perekonomian dewasa ini;
 - c. bahwa untuk kelancaran operasional dan kesejahteraan sarana penyediaan air minum, dipandang perlu mengesahkan Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penetapan Tarif Air Minum PDAM Way Rilau Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, tambahan lembaran Negara Nomor 2887);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Nomor 2888);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 30, tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 580-588 tahun 1988 tentang Pedoman Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-698 Tahun 1982 tentang Pola Petunjak teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 580-588 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 1987 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Mengesahkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penetapan Tarif Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kotamadya Bandar Lampung dengan Perbaikan-perubahan sebagai berikut :

A. - Pada kalimat membaca Keputusan Walikotaamadya daryo dihapus.

- Pada **Dasar hukum** mengingat, setiap penulisan Lembaran Negara Republik Indonesia disusul dengan Tahunnya kemudian Nomor.

- Pada Dasar Hukum mengingat Nomor Urut 2 dirubah menjadi nomor urut 3 dan nomor urut 3 dirubah menjadi nomor urut 2 dan harus dibaca.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Perukataan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387).

- Pada **Dasar hukum** mengingat Nomor 4 dilengkapi Tambahan Lembaran Negaranya dan harus dibaca;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213).

- Pada Dasar Hukum Nomor Urut 5 dilengkapi Tambahan Lembaran Negaranya dan harus dibaca;

Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254).

- Pada Nomor Urut 7 lama dirubah menjadi Nomor Urut 8.

- Pada konsideran mengingat ditambah Dasar Hukum baru dan diletakkan pada Nomor Urut 7 dan harus dibaca;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-089 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-538 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.

- B. Pada ketentuan memperhatikan dihapus.
- C. Pada kalimat menetapkan dilengkapi dan sama dengan Judul.
- D. Setiap penulisan PASAL diubah dan harus dibaca Pasal.

- E. Judul pasal 2 dipindahkan pada baris kalimat dan harus dibaca : Golongan Pelanggan terdiri dari :
- F. Dalam pasal 3 kata-kata seperti tertentu diubah dan harus dibaca seperti tertentu.
- G. Pada pasal 4 tertulis pemakaian diubah dan harus dibaca pemakaian.
- H. Judul dalam pasal 6 dan pasal 7 yaitu ketentuan Perelihan dan Ketentuan Penutup dihapus.
- I. Kata-kata Tambahan diubah dan dibaca salinan .

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung.
pada tanggal **15 September 1997.**

1
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

2
POLIDORO PRANTOTO
10

Salinan. Keputusan disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta
2. Walikotaemadya KDH, Tingkat II Bandar Lampung di Bandar Lampung
3. Ketua DPRD Tingkat II Bandar Lampung di Bandar Lampung
4. Direksi PDAM Way Kanan Dati II Bandar Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Biro Rinc. Perekonomian Setwilda Tingkat I Lampung
6. Himpunan Keputusan